

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global menjadi suatu persoalan yang dihadapi sekarang. Pemanasan global dapat berdampak adanya perubahan iklim. Perubahan iklim sekarang ini mendapatkan perhatian yang signifikan sebagai isu lingkungan global (Haque, 2010). Menurut IPCC (2007), suhu permukaan global rata-rata meningkat dengan laju $0.74^{\circ}\text{C} \pm 0.18^{\circ}\text{C}$ yang akhirnya perubahan iklim di beberapa tempat salah satunya di Indonesia. Salah satu sebab terjadinya perubahan iklim di Dunia yakni gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan dari aktifitas manusia. CDP (2013) 50 dari 500 perusahaan terbesar terdaftar di Dunia bertanggungjawab hampir tiga perempat dari 3,6 miliar metrik ton GRK (cdp.net). Usaha public internasional dalam menyikapi fenomena perubahan iklim berawal saat ditandatanganinya *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Kardono, 2010).

UNFCCC merupakan gagasan dibentuk melalui KTT Bumi yang tujuannya untuk mewujudkan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan (Irwhantoko dan Basuki, 2016). Negara-negara yang setuju saat perjanjian itu peduli dengan keadaan pembangunan sekarang hanya berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebaik-baiknya padahal akan mengakibatkan hambatan keberlanjutan pertumbuhan pembangunan tersebut. Untuk mengatasi kerugian ekonomi yang lebih tinggi maka UNFCCC menciptakan sebuah amandemen Internasional yang dikenal Protokol Kyoto. Protokol Kyoto yaitu sebuah konvensi Internasional yang dibuat di Kyoto, Jepang pada tahun 1997 dimana konvensi tersebut mengharuskan negara Annex I meminimalisir emisi GRK karna semenjak revolusi industri tahun 1850 konsumsi energi fosil menyebabkan perubahan iklim. Pada Protokol Kyoto, yang termasuk sebagai gas rumah kaca yaitu *Carbon dioxide* (CO₂), *Methane* (CH₄), *Nitrous oxide* (N₂O), *Hydrofluorocarbons* (HFCS), *Perfluorocarbons* (PFCS) dan *Sulfur hexafluoride* (SF₆).

Salah satu GRK yaitu emisi karbon dioksida. Total seluruh emisi CO₂ dalam pemanasan global dan perubahan iklim terbesar dibandingkan gas rumah kaca lainnya (UNFCCC, 1998). Implikasi Protokol Kyoto yaitu penghitungan karbon dimana suatu kewajiban untuk perusahaan dalam mengenali, mengukur, mencatat, menyajikan dan mengungkapkan emisi karbon. Menurut Ratnatunga (2016) penghitungan karbon berkaitan dengan efisiensi emisi karbon pada penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya

overhead pabrik, biaya *overhead* lingkungan dan biaya yang terkait dengan manajemen standar karbon.

Indonesia yaitu tiga negara penyumbang gas emisi tertinggi tahun 2015 (kompasiana.com). Indonesia terbukti mempunyai kontribusi pada emisi GRK hingga 85 persen bersumber dari pengundulan hutan dan kerusakan lahan gambut (Helm, 2000). Sektor industri sebagai pendorong kemajuan ekonomi Indonesia digerakkan dari energi yang berasal dari fosil, hingga berdampak pada lingkungan yakni meningkatnya suhu permukaan bumi dan diiringi perubahan iklim global.

Indonesia mengesahkan UU nomor 6 tahun 1994 tentang UNFCCC dan meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 untuk rangka melangsungkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam usaha meminimalisir emisi GRK global. Negara yang meratifikasi Protokol Kyoto berkomitmen dalam meminimalisir emisi karbon. Keseriusan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dapat ditunjukkan dengan disahkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang bertujuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, memantau dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK bagi kementerian atau lembaga. Hal yang melatarbelakangi Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto yaitu perubahan iklim hingga mengakibatkan gangguan air dan pangan karna Indonesia masuk negara agraris. Indonesia posisi peringkat sembilan dari sepuluh negara paling rawan dari risiko terkait keamanan pangan karna pengaruh perubahan iklim pada sektor pertanian dan perikanan (Huelsenbeck, 2012).

Indonesia berkomitmen dalam meminimalisir emisi karbon yang *disupport* oleh Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Pengurangan GRK bersifat sukarela. *Voluntary social* dan *environmental disclosures* banyak dilaksanakan perusahaan agar memelihara kualitas perusahaan, sehingga perusahaan bisa *exist* dan bebas dari berbagai penolakan publik. Dimana diuraikan pada Pasal 4, bahwasanya pelaku usaha andil dalam mengurangi emisi GRK. Salah satu upaya perusahaan dalam meminimalisir GRK yaitu pengungkapan emisi karbon. *Stakeholder* juga membutuhkan laporan mengenai tingkat gas rumah kaca dalam menilai kinerja perusahaan ketika perubahan iklim (Pratiwi, 2018).

Andrew & Cortese (2011) pengungkapan karbon ditampilkan dalam bentuk pengungkapan sukarela bertujuan dalam mengambil keputusan internal dan eksternal. Perusahaan yang menerapkan pengungkapan emisi karbon dapat membantu *stakeholder* dalam melaksanakan keputusan mengenai keadaan kinerja emisi karbon perusahaan, menekan perusahaan dalam meminimalisir emisi karbon, andil dalam debat masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan perubahan iklim (Ennis et al., 2012). Tilt (2001) pemegang saham

sudah lama dianggap sebagai kelompok penting dalam pengungkapan lingkungan. Pemerintah telah memaksa perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan lingkungan tentang perubahan iklim (Reid et al., 2009). Pratiwi (2018) membuktikan mengenai *stakeholder* yang berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. *Stakeholder* memiliki kontribusi sangat besar dalam pengungkapan emisi karbon dikarenakan dalam melindungi lingkungan dan kelangsungan perusahaan banyak pihak-pihak yang ikut dan memonitor.

Stakeholder berharap pada perusahaan-perusahaan agar menghitung dan melaporkan emisi yang dihasilkan, dikarenakan manajemen karbon dan pelaporan bertujuan dalam mengelola dan menilai risiko bisnis yang berkaitan terhadap perubahan iklim dan peluang bisnis (Lash & Wellington, n.d., 2007). Jika perusahaan dapat *manage* resiko perubahan iklim maka perusahaan dapat menghindari bencana yang diakibatkan *global warming*. Perusahaan yang melaksanakan pengungkapan lingkungan bisa meningkatkan legitimasi di mata publik sebab bertanggung jawab atas lingkungan. Perusahaan yang berada di sektor lingkungan lebih terdorong dalam meminimalisir emisi karbon (Reid et al., 2009). Menurut Hassel & Nilsson (2005) tujuan pengungkapan karbon bergantung pada rantai logika kausal yakni laporan karbon haruslah relevan dan berharga untuk investor dalam menjelaskan informasi mengenai pengaruh keuangan dari resiko iklim dan pengendalian karbon pada penilaian *asset* perusahaan.

Berbagai permasalahan lingkungan menjadi pemicu karena kurangnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Fenomena-fenomenanya yaitu pencemaran udara yang terjadi di Makasar, adanya asap yang dikeluarkan pabrik tripleks milik perusahaan PT Panply. Adanya tampak cerobong asap dalam lingkungan pabrik mengeluarkan kepungan asap tebal setinggi 10 meter sampai 15 meter. Posisi pabrik ada dipinggir pantai dekat pemukiman penduduk tepatnya ditimur rumah penduduk. Jika terjadi angin laut/angin yang mengarah baik ke utara, selatan terutama mengarah ke barat maka asap tersebut tentu akan mengepung pemukiman padat warga. Penduduk sekitar protes karna mengganggu aktifitas dan mengancam kesehatan (sindonews.com). Fenomena lainnya yaitu terjadinya pencemaran limbah alkohol di aliran sungai Bengawan Solo sehingga menyebabkan tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Air Minum Toya Wening Solo sempat tidak beroperasi. Pencemaran aliran sungai terpanjang di Jawa itu berdampak pada layanan terhadap 16.000 pelanggan perusahaan air minum daerah itu (BBCNews.com).

Menanggapi fenomena tersebut perusahaan lebih memperhatikan pengungkapan emisi karbon dapat dilihat dengan bertambah negara anggota PBB dalam meratifikasi Protokol Kyoto untuk menangani kerusakan lingkungan secara bersamaan. Perusahaan yang menerapkan

pengungkapan emisi karbon bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungannya yaitu mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan terhindar dari penurunan *operating cost*, pengurangan permintaan, risiko reputasi, proses hukum dan denda (Irwhantoko dan Basuki, 2016).

Pengungkapan emisi karbon yang pertama dipengaruhi oleh *Gender Diversity*. *Gender Diversity* berfokus pada kehadiran anggota dewan perempuan pada jajaran dewan komisaris. Coffey et al., (1998) keberadaan perempuan pada dewan komisaris dinilai kurang berorientasi pada kepentingan pribadi, sehingga dewan komisaris wanita dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pada dewan komisaris. Karena perempuan berorientasi mengarah pada kepentingan umum dan kualitas hidup, sehingga adanya perempuan pada dewan komisaris bisa meningkatkan pengungkapan emisi GRK. Liao et al., (2014) semakin besar proporsi wanita pada dewan komisaris mempunyai kecenderungan lebih transparan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor yang kedua adalah *Board Independence*. Dewan Komisaris Independen yakni pihak tidak terafiliasi terhadap pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya, serta perusahaan itu sendiri (KNKG, 2010). Dewan komisaris independen sebagai pengawas menyadari bahwasanya pengungkapan emisi karbon bersifat sukarela bisa bertujuan dalam mempertahankan legitimasi perusahaan. Legitimasi bisa dilihat sebagai suatu yang diinginkan dan dicari perusahaan dari publik (Ghozali dan Chariri, 2007). Liao et al., (2014) menunjukkan hasil pengaruh yang positif pada dewan komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka pengungkapan emisi karbon perusahaan semakin besar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Liao et al., (2014) menguji tentang “Pengaruh *Gender Diversity*, *Board Independence* dan *Environmental Committee* pada Pengungkapan Emisi Karbon”. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan Liao et al., (2014) yaitu terdapat pada variabel yang digunakan, dimana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yakni *Gender Diversity* dan *Board Independence*, hal ini disebabkan karena belum ada aturan atau kebijakan komite lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan *media exposure* sebagai variabel moderasi. *Media exposure* diharapkan bisa membantu perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon, karena media memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan informasi kepada publik. Kewaspadaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan pada berita dari media sangat dibutuhkan sebab berhubungan pada nilai dan

reputasi perusahaan (Jannah & Muid, 2014). Media tidak hanya berperan pasif berupa norma kelembagaan, namun juga berperan aktif menyediakan riwayat pemberitaan dalam mendeskripsikan nilai perusahaan (Widiawan et al., 2017). Semakin media tersebut aktif mengawasi lingkungan suatu negara, maka perusahaan akan semakin terpacu untuk mengungkapkan aktivitasnya (Nur dan Priantina, 2012). Media dapat menyoroti direktur yang tidak efektif untuk kepentingan pemegang saham atau bahkan pemangku kepentingan (Joe et., 2009). Dengan demikian adanya media membuat dewan komisaris bisa membuat perusahaan melakukan tata kelola perusahaan yang baik, hingga memotivasi perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi dalam menerapkan pengungkapan lebih untuk pemangku kepentingannya melalui pengungkapan emisi karbon.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dan GRK. Liao et al., (2014) mengungkapkan bahwa *Gender Diversity* dan *Enviromental Comiitte* berpengaruh positif pada pengungkapan emisi karbon. Sedangkan *Board Independence* tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Menurut Trufvisa et al., (2019) mengungkapkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen, keragaman gender dan keragaman kebangsaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Menurut Nainggolan & Rohman (2015) mengungkapkan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh pada emisi karbon, sedangkan keragaman gender tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Isu ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan masih terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memilih industri dalam ruang lingkup manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, karena proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dapat menghasilkan efek yang berdampak pada emisi gas rumah kaca. Selain itu, penelitian ini diambil dalam rentang waktu pada tahun 2016-2020 karena pada tahun tersebut merupakan tahun terbaru yang dapat dilakukan penelitian dan lebih menggambarkan apa yang terjadi pada masa ini.

Penelitian ini menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol pertama yaitu profitabilitas yaitu ukuran kinerja yang bisa dijadikan pertimbangan untuk pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dalam profitabilitas tinggi lebih mampu dalam melakukan pengungkapan dibanding perusahaan profitabilitas yang lebih rendah. Variabel kontrol kedua yaitu ukuran perusahaan yang menggambarkan skala

diklasifikasikannya perusahaan dalam besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan diukur dari besar total asset/kekayaan yang dimiliki atau total penjualan perusahaan tersebut (Suhardi et al., 2015). Sumber daya yang dipunyai perusahaan tergambar dari ukurannya. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar sumber daya yang dipunyai. Perusahaan yang berukuran lebih besar tentunya mempunyai lebih banyak aktivitas (Choi et al., 2013). Segala aktivitas operasional perusahaan sering berhubungan langsung dengan lingkungan (Irwhantoko dan Basuki, 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntansi karbon dengan judul “Pengaruh Gender Diversity dan *Board Independence* terhadap Pengungkapan Emisi Karbon dengan *Media Exposure* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah *board independence* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah *media exposure* dapat memoderasi pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah *media exposure* dapat memoderasi pengaruh *board independence* terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *board independence* terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *media exposure* dalam memoderasi pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Untuk mengetahui pengaruh *media exposure* dalam memoderasi pengaruh *board independence* terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Gender Diversity* dan *Board Independence* pada Pengungkapan Emisi Karbon dengan Media Exposure sebagai Variabel Moderasi

2. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Investor dan Calon Investor

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran berupa pertimbangan dalam membuat keputusan investasi, mengingat pengungkapan informasi yang berkaitan dengan emisi karbon merupakan salah satu hal yang penting bagi *stakeholder*. Sehingga di masa mendatang investor dapat mempertimbangkan kriteria tanggung jawab lingkungan perusahaan ke dalam strategi berinvestasi, atau dapat disebut *green portfolio strategy*.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan, membantu memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan emisi karbon (mengapa mereka perlu mengungkapkan hal tersebut) dan memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengungkapan emisi karbon.

3) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan terkait kebijakannya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat melihat sampai sejauhmana tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*, sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yang membahas penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian latar belakang masalah yang ingin diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian teori yang digunakan sebagai bahan acuan yang relevan

dengan penelitian ini serta temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup diantaranya mengenai analisis data dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan keterbatasan penelitian dan saran.

